

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Masyarakat

##### 1. Definisi Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut Society. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama” (Sofyan, 2018).

Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin merumuskan bahwa masyarakat atau society adalah “ *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes. And feelings of unity are operative*”. Unsur grouping dalam definisi itu menyerupai unsur “kesatuan hidup“ dalam definisi kita. Unsur common customs, traditions adalah unsur “adat-istiadat”, dan unsure “kontinuitas” dalam definisi kita. Serta unsur common attitudes and feeling of unity adalah sama dengan unsur “ identitas bersama”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur the largest yang berarti “ terbesar” (Sofyan, 2018). Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam (Sodik, 2020) mengatakan bahwa masyarakat bisa dikatakan sebagai makhluk yang hidup dan menciptakan kebudayaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan masyarakat adalah sekumpulan kelompok yang mempunyai ikatan dan kesamaan dalam beberapa hal seperti budaya, sikap, dan perilaku yang membentuk satu kesatuan yang dinamis. Kehidupan dinamis masyarakat tidak dapat dihindari, karena manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup mandiri didalam lingkungannya. Setiap anggota masyarakat memiliki perannya masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain (Muawanah, 2018: 63).

## **2. Ciri-Ciri Masyarakat**

Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk berinteraksi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang saling berinteraksi merupakan masyarakat, sebab suatu masyarakat harus memiliki suatu ikatan khusus. Ikatan yang menyebabkan suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas kesatuan tersebut, yang sifatnya khas, mantab dan berkesinambungan, sehingga menjadi adat istiadat (Zuldafrial, 2015:6).

Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat juga harus memiliki suatu ciri lain, yaitu rasa identitas bahwa mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Suatu negara, kota, atau desa memiliki keempat ciri yaitu (Zuldafrial, 2015:6):

- a. Interaksi antar warga.
- b. Adat istiadat, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warga.
- c. Kontinuitas dalam waktu.
- d. Rasa identitas yang kuat mengikat suatu warga.

## **3. Tipe-Tipe Masyarakat**

Tipe masyarakat jika dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat isitiadat adalah suatu aturan yang sudah mantab dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Sementara kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya tanpa menerima pengaruh dari luar (Zuldafrial, 2015;14).

Ciri-ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Hubungan lingkungan alam secara khusus dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) hubungan langsung dengan alam, dan (2) kehidupan dalam konteks yang agraris. Pola kehidupan masyarakat tradisional tersebut ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: (1) ketergantungan dengan alam (2) derajat kemajuan teknis dalam penguasaan dan penggunaan alam, dan (3) struktur sosial berkaitan dengan dua faktor ini, yaitu struktur sosial geografis serta struktur pemilihan dan penggunaan lahan.

b. Masyarakat transisi

Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat yang lainnya (Zuldafrial, 2015;16). Masyarakat transisi lahir karena beberapa sebab, pertama, secara geografis wilayahnya berdekatan dengan pusat kota sehingga mobilitas masyarakat cenderung tinggi. Kedua, terbukanya akses pedesaan yang melahirkan interaksi sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, sebagai salah satu akibat dari kebijakan pemerintah tentang dana desa yang melahirkan inovasi-inovasi (desa wisata yang menciptakan lapangan pekerjaan baru selain sektor pertanian).

Ketiga, adanya interaksi sosial antara desa dan kota akibat dari urbanisasi (Muryanti, 2022). Ciri-ciri masyarakat transisi: (1) adanya pergeseran dalam bidang misalnya pekerjaan, seperti pergeseran dari tenaga kerja pertanian ke sektor industri. (2) adanya pergeseran pada tingkat pendidikan, dimana sebelumnya tingkat pendidikan rendah, tetapi menjadi sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang meningkat; (3) mengalami perubahan kearah kemajuan (4) masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman; (5) biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota misalnya jalan raya.

### c. Masyarakat modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini (Zuldafrial, 2015;16). Masyarakat ini tidak menjadikan adat-istiadat sebagai dasar dalam kehidupannya, masyarakat modern selalu menganggap bahwa adat-istiadat yang menghambat kemajuan harus diganti dengan menerapkan nilai-nilai yang mudah diterima secara rasional (Sodik, 2020). Masyarakat modern relative bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Karena mengalami perubahan dalam perkembangan zaman.

Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri masyarakat modern, alam tidak lagi hal yang amat vital dalam menunjang kehidupan mereka seperti yang dialami masyarakat tradisonal (Zuldafrial, 2015;16). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan yang sekelompok masyarakat akan selalu ada, terlebih masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan golongan.

## **B. Transmigrasi**

### **1. Pengertian Transmigrasi**

Transmigrasi adalah suatu proses migrasi yang direkayasa dan dilaksanakan atau dikendalikan secara berencana oleh pemerintah. Secara harfiah menyebutkan bahwa transmigrasi (Latin: trans-seberang, migrare-pindah) adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia (Tanjungpura, 2023). Transmigrasi, apabila dilihat dari definisi demografi adalah bagian dari migrasi yang merupakan salah satu komponen perubahan atau pertumbuhan penduduk dengan tujuan pembangunan. Dengan kata lain, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu

pembangunan baik bagi daerah yang didatangi ataupun yang ditinggalkan dalam rangka pembangunan nasional.

Program transmigrasi mempunyai peran besar dalam pengembangan dan pembangunan wilayah tempat transmigrasi ditempatkan. Dengan adanya transmigran ini maka segala potensi yang ada di lokasi transmigran tersebut akan dimanfaatkan melalui kegiatan usaha tani yang mampu mendorong dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat transmigrasi sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dengan adanya program-program tersebut pemerintah Indonesia melanjutkannya dengan pertimbangan adanya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia (Purnamasari & Rusdi, 2021).

## **2. Syarat Transmigran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, telah diatur syarat-syarat menjadi transmigran yaitu (Banowati, 2013):

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Sudah berkeluarga.
- c. Berusia antara 18 sampai 50 tahun.
- d. Belum pernah bertransmigrasi.
- e. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
- f. Berbadan sehat.
- g. Memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan.
- h. Lulus seleksi. (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Kerja Dan Transmigrasi).

Tidak hanya itu, lokasi permukiman yang dapat di singgahi yakni tempat yang berpotensi ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk menyokong pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang

berkembang sebagai kawasan perkotaan yang baru sesuai dengan tata ruang wilayah.

### **3. Tujuan transmigran**

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian juga menyatakan tujuan transmigrasi adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Setyorini et al., 2013).

Selain itu adapun tujuan utama transmigrasi adalah tujuan utama demografis yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang sangat padat (Jawa, Madura, Bali) ke pulau lain yang tidak atau kurang padat (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua) untuk pemeratakan persebaran penduduk. Kedua transmigrasi mempunyai tujuan ekonomi dan pembangunan sebagai upaya agar daerah-daerah tujuan transmigrasi dapat berkembang lebih cepat. Ketiga mempunyai tujuan penahanan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa (UU No. Tahun 1972, tujuan penama) pada tahun keluar Undang-Undang No. 15 Tahun 1997, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1972, dimana tujuan transmigrasi disebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Banowati, 2013).

### **4. Jenis-jenis transmigrasi**

#### **a. Transmigrasi umum**

Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha (Wika Hardika Legiani, 2018). Transmigrasi umumnya melibatkan beberapa tahapan dan proses seperti:

- 1) Identifikasi Calon Transmigran
- 2) Pemilihan Lokasi Transmigrasi
- 3) Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

- 4) Pemandangan dan Adaptasi
- 5) Pemberdayaan Ekonomi
- 6) Integrasi Sosial dan Budaya
- 7) Monitoring dan Evaluasi

b. Transmigrasi swakarsa berbantuan

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan dilaksanakan oleh Menteri bekerja sama dengan Badan Usaha dengan ketentuan:

- 1) Mengutamakan penduduk yang relatif berpotensi dan ingin lebih meningkatkan kesejahteraannya;
- 2) Mengutamakan wilayah/daerah yang agak terbuka;
- 3) Pembiayaan dari keuangan negara dalam bentuk bantuan dan dari badan usaha dalam bentuk permodalan;
- 4) Mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer dan atau usaha sekunder dan atau usaha tersier.

c. Transmigrasi swakarsa mandiri

Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan atau kelompok, dengan ketentuan:

- 1) Mengutamakan penduduk yang berasal dari masyarakat yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya;
- 2) Mengutamakan wilayah/daerah yang sudah terbuka;
- 3) Merupakan bagian dari satuan permukiman yang sudah mempunyai prasarana dan sarana permukiman;
- 4) Pembiayaan dari transmigran;
- 5) Mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan kegiatan usaha primer, usaha sekunder atau usaha tersier;
- 6) Memperoleh layanan dan bantuan dari menteri;
- 7) Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh swadaya masyarakat transmigran.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan atau kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha, (Disnakertrans Prov NTB, 2020) dengan ketentuan mengutamakan wilayah/daerah yang sudah terbuka:

- 1) Mengutamakan penduduk yang berasal dari masyarakat yang telah mampu mengembangkan diri dan ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya;
- 2) Pembiayaan dari transmigran, dan atau badan usaha;
- 3) Memperoleh arahan, layanan dan bantuan dari menteri. Mengembangkan pola usaha yang ditetapkan dengan
- 4) Kegiatan usaha sekunder dan atau usaha tersier;
- 5) Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan oleh
- 6) Swadaya masyarakat transmigran dan atau badan usaha mitranya.

d. Transmigrasi lokal

Transmigrasi lokal merupakan perpindahan penduduk dalam satu daerah. Pindahanya bersifat setempat, misalnya dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan bahkan mungkin terjadi dalam satu provinsi (Nova, 2016). Program Resettlement atau transmigrasi lokal menurut laporan Djawatan Transmigrasi selain untuk mengatur komposisi masyarakat, juga bertujuan untuk memberi kesempatan pada penduduk asli untuk turut mengenyam bantuan kebijakan pemerintah dalam hal kependudukan (Aan Budiarto, 2021). Transmigrasi umumnya melibatkan beberapa tahapan dan proses seperti:

- 1) Identifikasi Wilayah Sasaran
- 2) Studi Kelayakan Lokasi
- 3) Seleksi Calon Transmigran
- 4) Persiapan dan Pelatihan
- 5) Pemandahan Fisik
- 6) Pembangunan Infrastruktur
- 7) Pemberdayaan Ekonomi
- 8) Integrasi Sosial dan Budaya

- 9) Monitoring dan Evaluasi
- 10) Perencanaan Keberlanjutan
- 11) Partisipasi Masyarakat

## C. Sejarah Transmigrasi Di Indonesia

### 1. Periode koloniasi

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonialisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Semenjak abad ke-19 *ethische politiek* telah mempengaruhi parlemen Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, secara tidak langsung pemerintahan colonial telah menerapkan pola transmigrasi dengan membawa banyak orang pribumi (terutama suku Jawa) untuk melakukan ekspansi ke pulau-pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Sumatera dan Kalimantan (Wismulyani Endar, 2018:3)

Pada akhir abad ke-19 suatu komisi negara ditugaskan untuk membuat penelitian mengenai kemakmuran rakyat daerah-daerah pedesaan di Jawa (*de mindere welvaart onderzoek*) (Swasono, E, S dan Singarimbun, M, 1986:8-9).

C.TH van Deventer, seorang anggota Raad van Indie dalam tulisannya yang berjudul *Een Eere Should* dalam majalah *De Gids*, Amsterdam (1899), menguraikan tentang kemeralatan penduduk di Jawa sebagai akibat dari kerja paksa dan *cultuur stelsel*. Van Deventer membuat suatu perumusan yang pokoknya adalah *educatie*, *irrigatie* dan *emigrasi*. Dengan kata lain, melaksanakan pembangunan sekolah, perbaikan produksi bahan pangan dan pemindahan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah lain di luar pulau Jawa. Berhubungan dengan itu pemerintah Hindia Belanda menugaskan seorang assistant resident bernama H.G. Heyting mempelajari kemungkinannya untuk memindahkan penduduk dari Jawa ke lain-lain daerah yang kurang penduduknya dan tanah cadangan pertaniannya masih luas. Heyting dalam laporannya pada tahun 1903 mengusulkan suatu sistem yang pokoknya adalah: (1) membangun desa-desa inti (*kern desa's*) dengan jumlah

penduduk 500 kk setiap desa inti, (2) penduduk desa inti diberi bantuan secukupnya agar ekonomi mereka lekas kuat dan selanjutnya desa-desa inti ini diharapkan akan bisa menjadi basis bagi para kolonis baru untuk membuka daerah sekitarnya.

Desa inti pertama dibangun pada tahun 1905 di Gedong Tataan, kira-kira 25 km di sebelah baratnya Tanjung Karang di pinggir jalan Kota Agung sampai pada tahun 1911 dibangun 5 desa inti. Dalam periode ini para kolonis dibantu secukupnya, sebagai perangsang, setiap kk diberi premi 20,00 guldens, dilengkapi dengan alat-alat masak dan alat-alat pertanian. Ditempat mereka dibantu dengan bahan perumahan dan bahan makan untuk 2 tahun. Menurut anggaran pemerintah, biayanya per kk adalah 300 guldens, tidak termasuk biaya pembangunan jalan dan irigasi percobaan diteruskan sampai 1927. Dalam periode 1911-1927 ini bank diikutsertakan untuk memberi kredit usaha dan untuk membeli bekal kerja. Setiap kk mengambil kredit sampai 200 guldens.

Dalam tahun 1921 dibuka satu proyek lagi di way semangka (Kota Agung) untuk orang-orang asal Wonosobo, dan desa intinya pun diberi nama Wonosobo. Pada tahun 1927 percobaan kolonialisasi itu dihentikan dan dibuat suatu evaluasi. Pada tahun 1930 sesuai dengan sensus penduduk, tercatat jumlah penduduk sebesar 31.459 jiwa, terdiri dari Gedong Tataan sebesar 28.345 jiwa dan Wonosobo 3.414 jiwa. Biayanya per kk 4 orang menurut perhitungan Van Der Zwaal menjadi 600 guldens bagi yang tetap tinggal di desa inti yang dibangun antara tahun 1095 dan 1911. Dalam periode 1911-1927 de volskrediet bank voor de lampongsche districhen menderita banyak kerugian, terutama karena mismanagement, sehingga bank ini dinyatakan bangkroet dan dilikudasi (Swasono, E, S dan Singarimbun, M, 1986;10-11).

## **2. Periode (1927-1930)**

Mr. C.C.J. Maassen dari *Department van binnenlandsch bestuur* ditugaskan untuk mempelajari soal transmigrasi yang berhubungan dengan percobaan kolonisasi Gedong Tataan dan Wonosobo. Tahun 1928 dan 1930

pemerintah mengirimkan 1.691 jiwa ke daerah-daerah kolonisasi Gedong Tataan dan Wonosobo hanya dengan biaya 25.000 guldens saja. Sistem ini dikenal sebagai *familie-kolonisatie* dan *bawoon systeem*. Dalam tahun 1928 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu peraturan untuk mengatur suatu kedudukan marga dalam daerah Lampung. Marga adalah Lembaga untuk membina kesatuan dan persatuan masyarakat berdasarkan keturunan (genealogis). Tahun 1930-1935 dunia dilanda oleh krisis ekonomi yang hebat, sampai banyak sekali perusahaan-perusahaan terpaksa menutup perusahaannya atau mengurangi tenaganya. Pada tahun 1932 mulai lagi dengan usaha pemindahan penduduk yang semula dihentikan pada tahun 1927. Sebelum tahun 1935 di daerah Sukadana yang sekarang terkenal sebagai daerah transmigrasi metro ini telah ditempatkan sekelompok kolonis, tapi pengiriman kolonis secara besar-besaran baru dimulai pada tahun 1935 setelah diadakan persiapan-persiapan yang lebih memadai. Pada awal tahun 1940 daerah ini sudah berpenduduk 47.000 jiwa.

Daerah kolonialisasi Sukadana (metro) dilaksanakan menurut peraturan *koloniasasi in marga verband*. Dalam tahun 1932 dikirimkan rombongan-rombongan kolonis ke Gedong Tataan dengan sistem *familie kolonisatie* dan sistem *bawon*, yang kemudian disalurkan ke daerah cadangan sekitar geong tataan, dan sebagian diserahkan kepada pemerintah marga, dibantu oleh Pangreh Praja De Jawa. Cara ini dinamakan "Marga Kolonisatie". Tahun 1931-1935 banyak perusahaan-perusahaan pertanian yang terpaksa menutup perusahaannya atau mengurangi buruhnya sesuai dengan kontraknya maka mereka dipulangkan ke desa masing-masing di Jawa. Untuk melaksanakan pemindahan penduduk secara besar-besaran diperlukan tanah untuk lahan pertanian yang sangat luas. Tahun 1941 terpilih 62 tempat yang diperkirakan cukup baik untuk dijadikan daerah kolonisasi penduduk dari Jawa. Luasnya 2.200.00 ha terpecah dari Aceh sampai Irian, diantaranya  $\pm$  60% terletak di Sumatera (Swasono, E, S dan Singarimbun, M, 1986;11-14).

Tahun 1936 dimulailah pengiriman kolonis ke Sulawesi, Kalimantan, Palembang (Sumatra Selatan), Bengkulu dan Jambi. Proyek baru dibuka di Teluk Bone (Massamba Dan Malili), Tugumulyo dan Belitang (Sumatera Selatan), Bangko (Jambi) dan proyek-proyek kecil di Bengkulu. Jumlah orang yang dikirimkan antara 1932-1934 sebanyak 10.507 jiwa, antara 1935-1941 sebanyak 237.954 jiwa. Dalam 7 tahun (1935-1941) jumlah orang yang dikirimkan baru mencapai rata-rata sekitar 34.000 jiwa.

### **3. Periode (1942-1959)**

Sejak tahun 1942 susunan pemerintahan di Lampung mengalami perubahan dengan perginya pejabat-pejabat kolonial Belanda dari Binnenlands Bestuur. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunan, perkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950. Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementerian Sosial.

Tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi di kemudian

hari yaitu seperti tercantum pada Undang-undang No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tahun 1950-1959 pemerintah memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang. Tahun 1956-1960 pemindahan penduduk Jawa sebanyak 2 juta orang, atau rata-rata 400 orang per tahun. Tahun 1961-1968 jawatan transmigrasi menurunkan lagi targetnya menjadi 1,55 juta, atau rata-rata 195 orang per tahun. Pada periode rencana delapan tahun, muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Pada kebijakan ini, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarya, artinya transmigran baru ditampung oleh transmigran lama seperti yang pernah dilakukan pada jaman Belanda dengan sistem bawon, kemudian membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri, sehingga tanggungan pemerintah tidak terlampau besar.

#### **4. Periode pelita (1969-1999)**

##### **a. Pelita I (1969/1970-1973/1974)**

Pada Pelita I, transmigrasi diarahkan pada kegiatan pembangunan pada umumnya, pembangunan daerah yang sedikit penduduknya guna penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan keseluruhan Indonesia, perluasan kesempatan kerja dengan memanfaatkan sumber-sumber alam dan sumber daya manusia yang lebih besar. Pada masa ini ditetapkan sebagai pokok-pokok ketransmigrasian dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No, 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Lembaga transmigrasi. (Tanjungpura, 2023)

##### **b. Pelita II (1974/1975-1978/1979)**

Pada pelita II rencana pembangunan lima tahun antara 1974-1979 konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial,

maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi ekspor. Target transmigrasi pada pelita II adalah memberangkatkan 50.000 keluarga atau 250.000 orang per tahun, atau jika dihitung selama 5 tahun transmigran yang harus diberangkatkan sebanyak 1,25 juta orang. Pada tahun 1976 dikurangi menjadi 108 ribu keluarga selama lima tahun, sedangkan realisasinya pemerintah hanya mampu memberangkatkan sebanyak 204 ribu orang atau sekitar 16% dari target yang dicadangkan (*SATU ABAD TRANSMIGRASI DI INDONESIA: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan \**, 2005)

c. Pelita III (1979/1980-1983/1984)

Pada pelita III ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Selama pelita III peranan modal dalam agribusiness dikaitkan dengan pengembangan transmigrasi. (Tanjungpura, 2023) Pelaksanaan transmigrasi didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi diluar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran sebanyak 250 ribu keluarga sampai lebih dari dua kali lipat. Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga.

d. Pelita IV (1984/1985-1988/1989)

Pada pelita IV program transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan transmigran, peningkatan mutu transmigran itu tidak hanya bagi transmigran lama tetapi juga bagi transmigran baru. Para transmigran ditingkatkan menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini di introduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksploitasi dan memelihara lingkungan hidup (Levang, 2003;14).

e. Pelita V (1989/1990-1993/1994)

Pada tahun 1993 timbul pengaruh baik dalam media massa, untuk memoles program dengan menggabungkan transmigrasi dengan

pelestarian lingkungan. Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Diakui oleh departemen transmigrasi dan permukiman perambah hutan, bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga orde baru belum memberikan pengaruh yang merata baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan UPT/Desa, maupun makro percepatan pertumbuhan wilayah (Levang, 2003;14).

Paradigma baru sudah jauh berbeda dengan paradigma lama sehingga dikeluarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui tujuan itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar *the circular flow of income* dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Dengan kata lain visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Sementara itu misi transmigrasi “mengisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan nasional” Departemen Transmigrasi dan PPH, op. cit., hlm18-19.

f. Pelita VI (1994/1995-1998/1999)

Selama masa Orde Baru terdapat banyak inovasi dalam pembangunan transmigrasi mulai dari transmigrasi biasa, berkembang, menjadi Transmigrasi Bedol Desa, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Industri Rakyat (PIR), dan Transmigrasi Swakarya Mandiri. Pada era reformasi transmigrasi mengalami penurunan baik lokasi maupun jumlah transmigran yang diberangkatkan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Otonomi Daerah yang membuat masing-masing

provinsi tidak terkekang oleh kebijakan dari pemerintah pusat pada era orde baru. Namun dari sisi lain, transmigrasi mengalami perkembangan dengan dikenalkannya konsep baru yaitu kota terpadu mandiri (KTM) dengan lingkup Kawasan yang lebih mampu bersaing sesuai dengan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 214 tahun 2007 (Sukarno et al., 2023).

### **5. Periode Reformasi (Tahun 2000-Sekarang)**

Program transmigrasi berkembang dengan pesat pada masa Orde Baru, dimana sejak perodesasi pembangunan lima tahun (pelita) mulai dari Pelita I s/d Pelita VI (1969-1999) program transmigrasi selalu dijalankan dengan memindahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu penduduk pada tiap periodenya. Secara total, program transmigrasi hingga saat ini telah berhasil membentuk 1.183 desa definitive, 385 kecaatan, 104 kota dan kabupaten, serta ibukota provinsi (Mamuju, Sulawesi Barat dan Tanjong Selor, Kalimantan Barat). Dari sisi sumberdaya alam, transmigrasi telah berhasil meningkatkan jumlah luas areal pertanian pangan (sawah) dengan metode ekstensifikasi lahan seluas 8.081.969 Ha yang sebagian besar adalah lahan yang diberikan sesuai dengan jatah untuk transmigran.

Program transmigrasi belangsung secara merata ke seluruh pulau di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pada era Orde Baru, transmigrasi bersifat top down, dimana menunjukan lokasi dan transmigran langsung ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa pertimbangan lain. Sehingga akibat dari kebijakan transmigrasi di orde baru, sering terjadi permasalahan baik dari segi aspek sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya. Transmigrasi era reformasi lebih banyak kendala, baik dari segi regulasi otonomi daerah maupun permasalahan di era orde baru dimana transmigrasi dianggap sebagai “jawanisasi” atau “islamisasi” sehingga, menimbulkan konflik di berbagai daerah yang berbuntut kekerasan dan pengusiran yang menyebabkan banyak transmigrasi yang pulang ke daerah asal. Tahun 2000-2004 sebanyak 87.571 kk per tahun yang mengikuti

program transmigrasi. Laju kian menurun hingga tahun 2005-2009 hanya 41.853 kk dan menjadi 7.310 kk per tahun pada 2010-2011.

Di tahun 2009, dicadangkan pengembangan Transmigrasi dengan paradigma baru berupa pembentukan Kota Mandiri Terpadu (KTM) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. KTM adalah kawasan Transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya didesain secara menyeluruh (holistik) dengan cakupan seluruh bidang dan komprehensif (Sukarno et al., 2023).

#### **D. Sejarah transmigrasi di Kalimantan Barat**

Pulau Jawa dan Madura merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000 yakni 121.352.608 jiwa. Tentunya sangat banyak daripada penduduk Pulau Kalimantan yang berjumlah 10.470.843 jiwa (Kuswono I, 2022). Beberapa daerah di Kalimantan yang sering menjadi tujuan transmigrasi termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Lokasi penempatan transmigrasi di Kalimantan bervariasi tergantung pada program pemerintah dan kebutuhan populasi transmigran. Pemerintah Indonesia memiliki program transmigrasi yang bertujuan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan transmigrasi, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang secara sukarela mau dan mampu untuk menetap di daerah kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Harjanti D, 2021 ).

Dalam penempatan transmigrasi Pemerintah memilih lokasi penempatan transmigrasi di Kalimantan Barat melalui berbagai pertimbangan, termasuk potensi sumber daya alam hal ini menjadi daya tarik bagi program transmigrasi karena potensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, ketersediaan lahan sebagai penempatan transmigrasi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kondisi geografis, penggunaan lahan yang sudah ada, dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber

daya alam, dan tujuan pengembangan wilayah. Selain itu dalam proses penyiapan lahan, pemerintah juga memperhatikan implementasi kebijakan transmigrasi dan dampak positifnya bagi pembangunan daerah penempatan. Dengan demikian, pemilihan lokasi penempatan transmigrasi didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif untuk tujuan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Puncak penyelenggaraan transmigrasi ke Kalimantan Barat berlangsung antara tahun 1979-1984 yang dapat memindahkan sebanyak 535.474 keluarga ke berbagai lokasi transmigrasi (Sugito, 2014) di Kabupaten Sanggau, khususnya Desa Tunggal Bhakti yang menjadi target wilayah transmigrasi ini memulai program transmigrasi pertama kali tahun 1981 melewati program Pembangunan Lima Tahun tahap III (PELITA III). Para penduduk transmigran ini mayoritas berasal dari wilayah Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pola yang digunakan adalah transmigrasi umum, yakni transmigrasi yang pelaksanaan dan biayanya ditanggung oleh pemerintah Indonesia, dari daerah asal sampai ke daerah tujuan hingga biaya hidup di penampungan serta biaya hidup di lokasi yang baru selama 1 tahun di lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah (Kuswono I, 2022).

## **E. Sosial Ekonomi**

### **1. Pengertian Sosial Ekonomi**

Menurut KKBI adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan umum. Sedangkan ekonomi dapat diartikan sebagai perilaku manusia dalam mencari alat pemuas kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya (Maruwae & Ardiansyah, 2020).

Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Maruwae & Ardiansyah, 2020):

- a. Lebih berpendidikan
- b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, Kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.
- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.
- d. Mempunyai ladang luas
- e. Lebih berpotensi pada ekonomi komersil produk
- f. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dnegan lredit
- g. Perkerjaan lebih spesifik.

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, seiring berkembangannya zaman semua kebutuhan hidup akan bertambah yang mengakibatkan adanya perubahan.

## **2. Faktor Pendukung Sosial Ekonomi**

Badan usaha yang menjadi pendukung sosial ekonomi diantaranya adalah koperasi, dimana Muryanto dan Budiono dalam Sofyan (2013) mengatakan (1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (2) bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Faktor yang menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat taraf hidup

Kebutuhan hidup atau taraf hidup dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera yaitu suatu kondisi terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup

penduduknya. Tujuan utama dari upaya pembangunan Indonesia adalah untuk memenuhi tujuan yang telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat secara khusus menetapkan bahwa tujuan Pemerintah Republik Indonesia (Asry et al., 2023)

b. Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan merupakan seluruh penerimaan, baik tunai atau bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam waktu tertentu (Sholihin, 2013). Pendapatan yaitu kompensasi pemberian jasa atau orang lain, setiap orang penghasil karena membantu orang lain (Putong, 2015). Sebagian besar sumber pendapatan masyarakat dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing. Bekerja memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Pendapatan seseorang harus bisa digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan memenuhi kebutuhan hidup secara langsung maupun tidak langsung. Badan pusat statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang atau individu yang telah bekerja mendapatkan gaji atau penghasilan selama jangka waktu tertentu baik berupa uang maupun barang. Badan pusat statistik menggolongkan menjadi 3 pengertian pendapatan sebagai berikut (Fitriyah, 2016) :

- 1) Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
- 2) Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.

- 3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman, uang, dan sebagainya.

Sumber pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 yakni, sumber pendapatan sektor formal, informal dan subsistem yang akan dijabarkan sebagai berikut (Fitriyah, 2016) :

- a) Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan. Sektor formal tersebut seperti pekerjaan yang terikat dalam sebuah instansi perusahaan atau pemerintah.
- b) Di sektor formal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti : penghasilan dagang, tukang buruh, dan lain-lain.
- c) Di sektor subsektor merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

c. Tingkat pendapatan

Pada umumnya tingkat pendapatan rumah tangga tidak berasal dari satu sumber, akan tetapi diperoleh dari dua atau lebih sumber pendapatan. Tingkat pendapatan tersebut bisa didasari oleh kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari. Badan pusat statistik (BPS) menggolongkan tingkat pendapatan penduduk kedalam 4 kategori :

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. >2.500.000 - Rp. 3.500.000 per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. >1.500.000 - Rp.2.500.000 Per bulan.
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 per bulan.

d. Tingkat kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Kesejahteraan menjadi tujuan paling utama dari elemen masyarakat terutama keluarga. Ketika masyarakat melakukan suatu pekerjaan masyarakat akan mendapatkan hal yang baru pada diri masyarakat tersebut seperti sebuah pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dapat mengembangkan potensi individu dan membantu individu untuk meraih Kesejahteraan bahwa individu yang sejahtera adalah individu yang dapat mengembangkan potensinya yang akan memengaruhi tujuan hidupnya secara optimal serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan serta rasa aman untuk bekerja melakukan perubahan, maupun kesempatan memilih untuk mencapai kehidupan yang layak (Darmawan dan Rismawati 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013) untuk mengukur kesejahteraan dapat dilihat dari tujuh indikator antara lain:

- 1) Kependudukan
- 2) Pendidikan, ada 3 yaitu:
  - a) Angka partisipasi sekolah
  - b) Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan
  - c) Angka buta huruf
- 3) Kesehatan, ada 3 yaitu:
  - a) Angka kesakitan
  - b) Penolong kelahiran
  - c) Angka harapan hidup
- 4) Fertilitas dan keluarga berencana
- 5) Pola konsumsi
- 6) Ketenagakerjaan
- 7) Perumahan

## **F. Sosial Budaya**

### **1. Pengertian Sosial Budaya**

Menurut Andreas Eppink sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sosial budaya mengandung makna struktur sosial dan budaya yang ada, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Conyers dalam Sutomo (2013:311) mengemukakan lima makna dan pengertian dari kata sosial. Pertama, kata sosial dihubungkan dengan hubungan atau sesuatu yang menyenangkan. Kedua, kata sosial ditempatkan sebagai lawan dari kata individual. Dalam pengertian ini kata sosial cenderung ke arah pengertian sebagai kelompok orang, sehingga dapat ditafsirkan sebagai society atau community. Ketiga, kata sosial diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Apabila dikaitkan dengan pembangunan, maka yang dimaksud bukan pembangunan yang menghasilkan obyek fisik yang bersifat kebendaan tetapi lebih berat pada aspek manusianya. Keempat, kata sosial diartikan sebagai lawan kata ekonomi. Kelima, konsep sosial diartikan dalam kaitannya dengan hak asasi dari seseorang sebagai anggota masyarakat.

Definisi sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa sosial budaya adalah struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat.

### **2. Perubahan Sosial Budaya**

Perubahan dan perkembangan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan terjadi perubahan struktur sosial dan demikian pula sebaliknya perubahan dan perkembangan struktur sosial menyebabkan terjadi perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan dan perkembangan sosial budaya terjadi akibat proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat.

Parsudi Suparlan (1981) mengungkapkan bahwa ada perbedaan pengertian antara sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial antara lain mencakup: sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik, kekuatan, dan penyebaran penduduk. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide, yang dimiliki Bersama oleh para warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan antara lain mencakup aturan-aturan, norma-norma yang digunakan sebagai keindahan atau kesenian dan bahasa.

Perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu dilakukan oleh agent of change atau agen yang datang baik dari dalam maupun dari luar dan terjadi mana kala semua yang ada dalam kelompok sosial menerima perubahan itu dengan segala konsekuensinya yang berkembang dikemudian hari. (Zuldafrial, 2015;25)

### **3. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya**

Perubahan dikenal dengan istilah evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu lama (Zuldrafrial, 2015;26) ciri-cirinya :

- a. Memerlukan waktu lama.
- b. Perubahan kecil.
- c. Perubahan tidak disadari oleh masyarakat.
- d. Tidak diikuti oleh konflik atau menimbulkan kekerasan.

Perubahan dikenal dengan istilah revolusi yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu sangat cepat (Zuldrafrial, 2015;26) ciri-cirinya:

- a. Membutuhkan waktu singkat
- b. Perubahannya besar karena menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan
- c. Perubahan disadari/direncanakan.
- d. Seringkali diikuti oleh kekerasan dan menimbulkan konflik.

### **4. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya**

Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat (Zuldrafrial, 2015;28-29) antara lain:

- a. Ketidakpuasan terhadap sesuatu yang ada, sehingga timbul keinginan untuk mencari atau menciptakan situasi baru yang lebih baik.
- b. Timbulnya ketimpangan antara hal-hal yang sekarang ada dan yang seharusnya ada di masyarakat.
- c. Timbul tekanan dari luar yang mengharuskan individu atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

Menurut Alvin Betrand awal dari proses perubahan sosial adalah komunikasi yaitu penyampaian ide, gagasan, nilai, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga dicapai kata kesepahaman. Menurut David Mc Clelland dorongan untuk perubahan adalah adanya hasrat meraih prestasi (*need for achievement*) yang melanda masyarakat. Sedangkan Prof. Soerjono Soekanto berpendapat perubahan sosial disebabkan oleh faktor intern dalam masyarakat itu dan faktor ekstern. (Zuldrafrial, 2015;29) Faktor intern antara lain:

- a. Bertambah dan berkurangnya penduduk (kelahiran, kematian, imigrasi)
- b. Adanya penemuan baru seperti discovery: penemuan ide atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Invention: penyempurnaan penemuan baru. Innovation/ inovasi: pembaruan atau penemuan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menambah, melengkapi atau mengganti yang ada. Penemuan baru didorong oleh kesadaran masyarakat akan kekurangan unsur dalam kehidupannya, kualitas ahli atau anggota masyarakat.
- c. Konflik yang terjadi dalam masyarakat;
- d. Pemberontakan atau revolusi

Faktor Ekstern antara lain:

- a. Perubahan alam;
- b. Peperangan;
- c. Pengaruh kebudayaan lain meliputi difusi (penyebaran kebudayaan). akulturasi (pembauran antar budaya yang menghasilkan sifat khasnya). Asimilasi (pembauran antar budaya yang menghasilkan budaya yang

sama sekali baru batas budaya lama tidak tampak lagi). (Zuldrafrial, 2015;29)

## 5. Unsur-unsur kebudayaan

Dalam menganalisa suatu kebudayaan, seorang ahli antropologi membagi seluruh kebudayaan yang terintegrasi itu ke dalam unsur-unsur besar yang disebut “unsur-unsur kebudayaan universal” unsur kebudayaan universal dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh budah yang disebut sebagai inti pokok dari setiap kebudayaan (Zuldrafrial, 2015;19-20) berikut unsur-unsur kebudayaan:

- a. Bahasa
- b. Sistem pengetahuan
- c. Organisasi sosial
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi
- e. Sistem pencaharian hidup
- f. Sistem religi
- g. Kesenian

## G. Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari yang namanya hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan penelitian yang saat ini dilakukan supaya hasil penelitian lebih maksimal lagi kedepannya.

**Tabel 2.1 Penelitian Relevan**

Nama	Dian Purnamasari Dan Rusdi (2021)	Marwiyati Ulfa dan Miftaful Rahman (2019)	Yuyun Arrining Jayanti dan Puji Lestari
Judul	Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Desa Perintis di Rimbo Bujang (1975–2020)	Analisis Dampak Kedatangan Transmigran Terhadap Kondisi Sosial (Budaya) Penduduk Asli Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	Dampak Perubahan Sosial Budaya Desa Transmigrasi Di Upt (Unit Permukiman Transmigrasi) Mersam III Desa Tapah Sari, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari

			Provinsi Jambi.
Fokus Masalah	Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi Desa Perintis tahun 1975-2020	Dampak kedatangan transmigran terhadap kondisi sosial (budaya) penduduk asli Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pandangan penduduk asli kabupaten luwu timur terhadap para transmigran.	Faktor penyebab dan dampak dari adanya perubahan sosial budaya di desa transmigrasi.
Metode Penelitian	Sejarah	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	Alasan masyarakat jawa mengikuti transmigrasi pada tahun 1975 untuk mencari lahan yang lebih luas lagi karena lahan yang ada di tanah Jawa sangat sempit sementara penduduk semakin padat, perekonomian yang sulit sehingga mengikuti transmigrasi ingin mengubah hidup dan perekonomian lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari segi ekonomi membawa pengaruh yang lebih.	Penduduk asli Kabupaten Luwu Timur merasa senang dengan kedatangan para transmigran namun semakin lama, penduduk asli merasakan kesombongan dari para transmigran akibat keberhasilannya dalam mengolala perkebunan dibanding dengan penduduk asli. Kemudian ada berbagai dampak yang terjadi akibat kedatangan para transmigrasi ini, yaitu dari segi perekonomian, bahasa, dan budaya.	Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu: 1) adanya perubahan jumlah penduduk; 2) inovasi; dan 3) adanya pertentangan atau konflik. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu: 1) pengaruh lingkungan alam; dan 2) pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

## H. Kerangka Berfikir

Sosial budaya mencakup dua aspek yang saling terkait, "sosial" dan "budaya". Sosial berkaitan dengan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Budaya adalah keseluruhan sistem nilai, kepercayaan,

norma, bahasa, seni, adat istiadat, teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Ini mencakup berbagai bentuk hubungan, norma, nilai, dan struktur sosial yang membentuk cara manusia berinteraksi satu sama lain. Budaya membentuk identitas kolektif suatu kelompok dan mencerminkan cara hidup masyarakat tersebut. Aspek sosial budaya mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, tata cara, tradisi, dan praktik-praktik yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Sosial budaya secara keseluruhan membantu menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia dan bagaimana masyarakat dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Dalam kehidupan masyarakat transmigrasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan baru, interaksi dengan masyarakat setempat, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Aktivitas ekonomi masyarakat sendiri mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat transmigrasi sering menghadapi tantangan, seperti perbedaan budaya, dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Pemindahan ke wilayah baru dapat mempengaruhi identitas masyarakat transmigrasi. Mereka mungkin tetap mempertahankan sebagian besar tradisi dan budaya mereka, tetapi juga bisa terjadi perubahan atau penggabungan dengan budaya baru tempat mereka tinggal. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat transmigrasi dengan menggunakan metode kualitatif.

Melihat perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat transmigrasi mempengaruhi perubahan hidup yang terjadi dalam berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa sangat beragam mulai dari pendidikan, pekerjaan, ekonomi, perubahan lokasi dan tempat tinggal, dan pengalaman kultural dan perjalanan mengalami kebudayaan baru, melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berbeda, atau terlibat dalam pertukaran budaya dapat membuka pandangan dan memperkaya kehidupan masyarakat di Desa Tunggal Bhakti,

maka berdampak pada kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang ada di Desa Tunggal Bhakti.

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



